

PEMKOT KENDARI GANDENG DISTRIBUTOR GELAR PASAR MURAH UNTUK TEKAN INFLASI



Sumber gambar: https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2025/03/10/WhatsApp-Image-2025-03-10-at-12.07.51_3c34e683.jpg.webp

Kendari (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) menggandeng berbagai distributor dalam melakukan gerakan pangan murah (GPM) untuk menekan laju inflasi pada Ramadhan hingga Idul Fitri 1446 Hijriah di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Wali Kota Kendari Siska Karina Imran saat ditemui di Kendari, Senin, mengatakan bahwa pada GPM tersebut pihaknya melibatkan sebanyak 15 distributor serta sejumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang diselenggarakan di halaman kantor Wali Kota Kendari. "Berdasarkan data dari Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari 15 distributor tersebut antara lain Bulog, UD Gangga, UD Bawang, UD Telur, PT Wira Eka, PT PNJ, Family Garden, Dinas Pertanian Kota Kendari, Dinas Perikanan, Tunas Bakti, PT Kapal Api, Putra Mas Mandiri, vins frozen food, UD Arzetty Bogasari, dan Ok Buah," kata Siska.

Ia menyebutkan pelibatan distributor tersebut untuk menyediakan berbagai komoditas dengan harga murah di bawah pasar yang dilaksanakan selama empat hari, yakni 10-14 April 2025 seperti beras, telur, bawang putih, bawang merah, gula, minyak goreng, dan beberapa kebutuhan pokok lainnya. "Jadi, harga di pasar murah ini bedanya Rp10 ribu dari pasar (untuk harga beras). Dan ini adalah bentuk perhatian pemerintah Kota Kendari pada masyarakat dalam menghadapi Ramadhan hingga Idul Fitri," ujarnya.

Siska juga akan melaksanakan gerakan pangan murah di 11 titik di seluruh wilayah Kota Kendari, untuk menjaga stabilitas dan pasokan harga bahan pokok selama Ramadhan. Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari Abdul Rauf

menegaskan bahwa kegiatan pasar murah tersebut untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di tingkat produsen dan konsumen selama Ramadhan hingga Idul Fitri, serta meningkatkan keterjangkauan dan daya beli bahan pokok bagi masyarakat. "Harapan kami, dengan adanya GPM ini harga komoditas pangan stabil dan selalu tersedia," ucap Abdul Rauf.

Dia menambahkan bahwa pihaknya juga telah meminta kepada seluruh camat di Kota Kendari untuk mengimbau seluruh masyarakat agar dapat berbelanja di GPM tersebut. "Adanya GPM ini diharapkan masyarakat dapat memperoleh pangan yang berkualitas dengan harga yang murah," jelasnya. Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari juga akan melaksanakan gerakan pangan murah di 48 titik di seluruh wilayah Kota Kendari, untuk menjaga stabilitas dan pasokan harga bahan pokok pada tahun 2025. Selain itu, pihaknya juga sedang berinovasi untuk membentuk kios pangan di setiap kelurahan di Kota Kendari, sebagai upaya untuk menstabilkan harga pangan di Kota Kendari.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/500117/pemkot-kendari-gandeng-distributor-gelar-pasar-murah-untuk-tekan-inflasi>, "Pemkot Kendari gandeng distributor gelar pasar murah untuk tekan inflasi", tanggal 10 Maret 2025
2. <https://bursabisnis.id/cegah-inflasi-pemkot-kendari-kerjasama-15-distributor-besar-gelar-pasar-murah/>, "Cegah Inflasi, Pemkot Kendari Kerjasama 15 Distributor Besar Gelar Pasar Murah", tanggal 10 Maret 2025

Catatan:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024, pada:
 1. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa, "Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah dokumen yang menjadi acuan bagi kementerian dan lembaga pemerintahan non kementerian, serta pemerintah daerah dalam merencanakan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah."
 2. Pasal 2
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa, "Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2024 meliputi:

- 1) sasaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - 2) fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - 3) jadwal pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.”
- b. ayat (2) menyatakan bahwa, “Sasaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan sesuai dengan tema rencana kerja pemerintah tahun 2024 yaitu mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.”
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa, “Fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun berbasis prioritas dan risiko.”
 - d. ayat (4) menyatakan bahwa, “Jadwal pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Menteri.”
- Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 poin I nomor 4 pada Tabel, berdasarkan Arah kebijakan dan Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2024 terkait Pengendalian inflasi dengan sasaran tercapainya target laju inflasi sebesar 1,5% - 3,5% secara year on year dengan fokus pembinaan dan pengawasan umum yang terbagi 2, yaitu:
1. Aspek keuangan daerah, Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait integrasi program dan kegiatan serta anggaran pengendalian inflasi ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah terkait:
 - a. ketersediaan pasokan;
 - b. keterjangkauan harga; dan
 - c. kelancaran distribusi;
 2. Aspek kebijakan daerah, pembangunan daerah, keuangan daerah, kerja sama daerah, Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait kepatuhan daerah dalam melaksanakan 9 upaya konkrit pengendalian inflasi:
 - a. pemantauan harga dan stok barang;
 - b. rapat teknis tim pengendali inflasi daerah;

- c. menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting;
- d. d. penganangan gerakan menanam;
- e. operasi pasar murah;
- f. sidak ke pasar dan distributor;
- g. koordinasi dengan daerah penghasil komoditi;
- h. merealisasikan belanja tidak terduga; dan
- i. memberikan bantuan transportasi.